



RENCANA KERJA 2022



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Taman Pahlawan No.9 Purwakarta
Email: dinsosp3a.kab.purwakarta@gmail.com
Website: dinsosp3a.purwakartakab.go.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan anugerah-Nya disertai kerjasama dan kebersamaan seluruh keluarga besar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dan fasilitasi dari pejabat berwenang, telah tersusun Rencana Kerja (RENJA) Dinsos P3A Kab Purwakarta Tahun 2022. Penyusunan Renja ini didasari ketentuan yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Perda No 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah Penjabaran dari janji kampanye Kepala daerah terpilih yang di rumuskan melalui pencapaian Visi dan Misi, Strategi arah kebijakan dan program priotitas.

Renja Dinsos P3A Tahun 2022 ini memuat uraian program dan kegiatan Dinsos P3A dalam tahun 2022. Dokumen ini diharapkan dapat membawa peningkatan kinerja Dinsos P3A dan memberikan arah kebijakan yang jelas untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta.

Harapan kami semoga Renja Dinsos P3A Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat terutama bagi pengembangan organisasi lebih lanjut untuk mendukung pembangunan daerah, harapan yang lebih luas mudah – mudahan kinerja Dinsos P3A Kabupaten Purwakarta dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan Kabupaten Purwakarta.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang.....	1
2. Dasar Hukum.....	3
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	10
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah	13
2. Analisis Kinerja Pelayanan.....	14
3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	32
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	34
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN.....	35
1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	59
2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3. Program dan Kegiatan.....	37
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	44
BAB V. PENUTUP.....	58





BAB I

RENCANA KERJA 2022

**DINAS SOSIAL P3A
KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek atau 1 (satu) tahunan (RKPD). Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah menyiapkan Renja – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4).

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disingkat dengan RENJA Dinsos P3A adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Secara garis besar urutan tahapan penyusunan RENJA Dinsos P3A 2022 adalah sebagai berikut :

- Melakukan Review RPJMD dan Renstra Dinsos P3A
- Melakukan Review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purwakarta TA 2022
- Melakukan Review dan Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinsos P3A



Tahun lalu

- Merumuskan Tujuan, Kebijakan, Sasaran
- Merumuskan Prioritas Program dan Kegiatan
- Merumuskan Usulan Pagu Indikatif dan prakiraan anggaran
- Menyusun Dokumen Rancangan RENJA Dinsos P3A
- Melakukan Review Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Renja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang kemudian dijabarkan secara operasional kedalam RAPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dan merupakan salah satu perangkat dasar untuk ketercapaian pelayanan yang akan diberikan pada masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



1.2 Dasar Hukum

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun atas dasar Mandat dan Landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
 9. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540) ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 237)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2006 Nomor 4) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2016 Nomor 9) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1) ;
31. Peraturan Bupati Purwakarta nomor 103 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta ;
32. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 Tahun 2021 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Purwakarta tahun 2022;



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2022 adalah sebagai tindak lanjut dari Program Dinas yang tertuang dalam Rencana Strategis dan sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2022.

Tujuan disusunnya RENJA Dinsos P3A Tahun 2022 adalah sebagai dasar atau acuan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta bidang keluarga berencana yang terpadu dengan perencanaan tingkat provinsi, nasional maupun kabupaten dan kota. Rencana pelaksanaan juga dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu anggaran yang sedang disusun maupun prakiraan maju.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Bupati Purwakarta 194 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RENJA Dinsos P3A, proses penyusunan RENJA Dinsos P3A keterkaitan antara RENJA Dinsos P3A dengan dokumen RKPD, Renstra Dinsos P3A, dengan RENJA Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. *Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinsos P3A Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinsos P3A*

- Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinsos P3A tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA Dinsos P3A sudah disahkan.
- Menjelaskan pencapaian target Renstra Dinsos P3A berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Dinsos P3A tahun-tahun sebelumnya.

Melakukan Review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinsos P3A tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinsos P3A mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinsos P3A dan/atau realisasi APBD untuk Dinsos P3A

2.2. *Analisis Kinerja Pelayanan Dinsos P3A*



Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Dinsos P3A berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK.

2.3. *Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinsos P3A*
Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsos P3A.

2.4. *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.5. *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*

Menjelaskan hasil telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinsos P3A.

3.2. *Tujuan dan Sasaran RENJA Dinsos P3A*

Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsos P3A yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinsos P3A.



3.3. *Program dan Kegiatan*

Menjelaskan mengenai :

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, antara lain Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SPM
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Permasalahan dan solusi
- c. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- d. Rencana tindak lanjut.





BAB II

RENCANA KERJA 2022

**DINAS SOSIAL P3A
KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Sosial Pembeberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinsos P3A, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinsos P3A Kabupaten Purwakarta terkait dengan kewenangan dan urusan sebagaimana diatur dalam Pembagian Urusan Pemerintah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 yaitu Urusan Sosial termasuk dalam salah satu urusan wajib pelayanan dasar. Oleh karenanya dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinsos P3A sudah mengakomodir untuk pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan SPM, melalui pelayanan dasar luar panti.

Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun-tahun sebelumnya

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak merupakan nomenklatur baru yang dikukuhkan Tahun 2016 melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Urusan Sosial Sebelumnya bergabung dengan Dinas Tenaga kerja transmigrasi dan Sosial disingkat Disnakertransos sedangkan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak semula bergabung Dengan BKBPIA Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Ibu dan anak Skrin menjadi DPPKB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Sehingga dalam pelaksanaan kinerja terdapat sedikit



perbedaan.

Program utama yang dilaksanakan dan merupakan kewenangan Dinsos P3A tahun 2022 yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Sosial, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Sosial yakni Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan. Sedangkan program pembangunan yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya,
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,
- 3) Program Pembinaan Anak Terlantar, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja. Sedangkan program pembangunan yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak,
- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan,
- 3) Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Program-program penunjang yang merupakan program dukungan terdiri dari program-program aspek pemerintahan Urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2022 tidak ada perubahan dengan Program pada tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- 2) Program Pemberdayaan Sosial
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak



Kekerasan

- 4) Program Rehabilitasi Sosial
- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 6) Program Penanganan Bencana
- 7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- 8) Program Pengurustamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan

- 9) Program Perlindungan Perempuan
- 10) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 11) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan anak
- 12) Program Pemenuhan hak Anak (PHA)
- 13) Program Perlindungan Khusus anak

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINSOS P3A KABUPATEN PURWAKARTA 2018 - 2023

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun lalu dan pencapaian Kinerja Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinsos P3A melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (*review*) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinsos P3A Kabupaten Purwakarta berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinsos P3A pada Renstra Tahun 2018-2023. Dokumen Renja Tahun 2018 menetapkan 13 (tiga belas) Program yang terkait untuk dilaksanakan Dinsos P3A Kabupaten Pwk melalui 31 (tiga puluh satu) kegiatan terdiri dari 86 sub kegiatan, dengan



alokasi Rp.11.724.439.488 dengan realisasi sd Tw III TA 2021 sebesar Rp. 6.396.684.965,00 dengan tingkat realisasi 54,56%.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUINGAN ANAK KAB PURWAKARTA

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Dasar pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 2018-2023 menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kementerian Sosial Belum dapat diterapkan keseluruhan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta karena anggaran dan lembaga serta SDM dalam penanganan bidang sosial masih terbatas. Keberhasilan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Barat dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan secara umum telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI CAPAIAN	KEUANGAN			
							PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Persentase Fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya yang diberdayakan	Person	90	82,03	91	Sangat Tinggi	Pemutakhiran Data PMKS	51.912.500	49.732.400	95,8
							Pemberdayaan KUBE Bagi Keluarga Miskin	75.000.000	75.000.000	100
							Pemberdayan Lajut Usia Produktif	132.161.000	131.417.250	99,43
							Penanganan Penyakit Sosial dan Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	150.000.000	139.600.000	93,06
2	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Person	90	82,39	91,5	sangat tinggi	Fasilitasi Alat Bantu Penyandang Disabilitas	100.000.000	99.230.000	99,23
							Pengutan Ekonomi Keluarga Disabilitas	100.000.000	99.750.000	99,75

						Penanganan dan Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	155.000.000	153.250.000	98,87
						Pemberdayaan Ex Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	50.000.000	48.250.000	96,5
						Fasilitasi Pengembangan dan Pemulihan Fungsi Sosial bagi Lanjut Usia	150.000.000	149.232.500	99,48
						Peningkatan Kearifan Lokal dalam rangka penanggulangan Konflik Sosial	50.000.000	50.000.000	100
						Peningkatan Keserasian Sosial	50.000.000	50.000.000	100
						Peningkatan Keterampilan Ex Pekerja Sex Komersial (PSK)	100.000.000	91.399.000	91,39
						Fasilitasi Penunjang Kinerja Satgas Bencana Sosial dan Alam	150.000.000	149.655.000	99,77
						Bantuan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	50.000.000	50.000.000	100
						Penanganan Anak Jalanan	50.000.000	48.500.000	97
						Peningkatan Kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	50.000.000	49.500.000	99

3	Jumlah Anak terlantar yang dibina	orang	20	200	1000	Melampaui	Penanganan bagi Anak Jalanan	50.000.000	42.960.000	85,92
4	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	LKS	30	35	116,67	Melampaui	Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	51.000.000	49.500.000	97,5
5	Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	orang	90	35	38,89	sangat Rendah	Pengembangan Media Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Anak di Kabupaten Purwakarta	50.000.000	44.150.000	88,3
6	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen	85	70	82,35	Tinggi	Penanganan Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekerasan	50.000.000	50.000.000	100
							Pasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan terhadap Korban tindak kekerasan	50.000.000	-	0
7	Persentase Peran serta Gender dalam Pembangunan	Persen	85	81	95	Sangat tinggi	Pengembangan Potensi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)	150.000.000	95.350.000	63,5667

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Tahun 2021 sd Triwulan III										
NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI CAPAIAN	KEUANGAN			
							PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Persentase Fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya yang diberdayakan	Persen	90	82,03	91	Sangat Tinggi	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	146.404.457	140.425.500	95,92
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	3.057.363	-	0,00
							Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan	727.914.169	662.498.500	91,01
							Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekon	42.848.573	-	0,00
2	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	90	65	72	Tinggi	Penyediaan Permakanan	131.660.154	29.633.500	80,74
							Penyediaan Sandang	68.210.449	135.352.000	43,44
							Penyediaan Alat Bantu	149.058.676	-	90,80
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Sp	22.170.447	-	
							Pemberian Bimbingan Sosial kepada Ke	47.007.875		
							Pemberian Akses ke Layanan Pendidika	61.083.482	-	0
							Pemberian Layanan Kedaruratan	62.992.223	27.394.200	43,49
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Kel	88.118.339	53.595.550	60,82
3	Jumlah Anak terlantar yang dibina	orang	20	65	150	Melampaui	Penjangkauan Anak Anak Terlantar	15.680.605	10.024.100	63,92674
							Rujukan Anak Anka Terlantar	3.861.366	3.358.000	86,96404
							Pemantauan terhadap pelaksanaan Per	9.000.072	6.637.950	73,75441
4	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	LKS	30	20	66,67	Tinggi	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya	32.992.706	-	97,5
5	Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	orang	90	20	20	sangat Rendah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan	9.445.012	-	0
							Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG t	59.520.888	5.782.141	9,71
6	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen	85	70	82,35	Tinggi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	29.116.563	17.386.300	59,71
							Pengembangan Komunikasi, Informasi	55.779.301	-	0
							Pengembangan Komunikasi, Informasi	54.070.715	-	0
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	104.386.316	61.800.000	59,2
							Penyediaan Layanan Pengaduan Masya	21.000.072	-	0
							Penguatan Jejaring antar Lembaga Peny	1.865.733	-	0
7	Persentase Peran serta Gender dalam Pembangunan	Persen	85	81	95	Sangat tinggi	Pasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Pe	49.999.804	-	0
							Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pere	95.726.326	-	72,9
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	32.284.193,00	25.534.193	79,09

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program dan Kegiatan	APBD Perubahan Tahun 2021 (sesuai DPA SIPD)		Realisasi Triwulan III Tahun 2021		Selisih	
		Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Pagu	%
I	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		31,886,397.00		4,109,900.00		12.89
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	8,859,786.00		0.00		0.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Eksemplar	4,859,033.00		0.00		0.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5 Eksemplar	4,445,188.00		0.00		0.00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Eksemplar	4,110,111.00	5 Eksemplar	4,109,900.00		99.99
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ATK dan 4 SPPD	9,612,279.00		0.00		0.00
II	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6,186,750,900.00		4,130,819,355.00		66.77
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41 org	6,169,675,685.00	41 org	4,130,819,355.00		66.95
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 eksemplar	17,075,215.00		0.00		0.00
III	Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5,904,634.00		5,151,300.00		87.24

1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 x Rekon dan 4 laporan	5,904,634.00	3 x Rekon dan 4 laporan	5,151,300.00		87.24
IV	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		64,629,391.00		63,493,535.00		98.24
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Perda	64,629,391.00	1 Perda	63,493,535.00		98.24
V	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah		384,430,790.00		230,620,200.00		59.99
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 rekening	25.142.368	3 rekening	12.887.400		51.26
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26 jenis	30.606.994	15 jenis	15.410.700		50.35
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		77.136.079		41.746.900		54.12
4	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	10047 lbr, 193 buku	50.219.295	5047 lbr, 193 50 buku	34.903.000		69.50
5	Fasiliatsi Kunjungan Tamu	300 dus Snack rapat mamin tamu	20.200.000	20 dus snack	3.900.000		19.31
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SPPD 7 org gol 3, gol Iv 5 org gol II 2 org dan biaya penginapan gol IV/III 2 org gol IV 5 org	65.960.000	SPPD 2 org gol 3, gol IV 2 org gol II 2 org dan biaya penginapan gol IV/III 1 org gol IV 1 org	13.926.300		21.11

7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 buku	58.100.020	10 buku	58.015.900		99.86
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jasa konsultasi , server, router wifi 3, PC , destoop computer apple I mac	57.066.034	Jasa konsultasi , server, router wifi 3, PC , destoop computer apple I mac	49.830.000		87.32
VI	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		661,389,686.00		0.00		0.00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	504,821,200.00	Dinolkan perubahan anggaran	0.00		0.00
2	Pengadaan Mebel	Kursi dan meja staff, Filling cabinet lemari	60,174,529.00		0.00		0.00
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPS 1 unit alat kantor lainnya	96,393,957.00		0.00		0.00
VII	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		367,532,800.00		241,834,224.00		65.80
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Alat Listrik , lampu baret dan lampu sorot	106,804,800.00	Alat Listrik , lampu baret dan lampu sorot	45,666,999.00		42.76

2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 org jasa tenaga admin PBASN, Kebersihan dan IT	260,728,000.00	9 org jasa tenaga admin, Kebersihan dan IT	196,167,225.00		75.24
VIII	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		228,978,825.00		36,170,050.00		15.80
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak R4 dan R2	98,540,000.00	Pajak R4 dan R2	28,980,050.00		29.41
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,438,825.00		0.00		0.00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		30,000,000.00		7,190,000.00		23.97
IX	Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		232,779,480.00		23,573,806.00		10.13
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		64,080,149.00		23,573,806.00		36.79
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		0.00		0.00		0.00

3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		46,875,442.00		0.00	0.00
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		88,831,183.00		0.00	0.00
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		32.992.706		0.00	0.00
X	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial		630,301,645.00		352,273,700.00	55.89
1	Penyediaan Permakanan		131,660,154.00		106,298,450.00	80.74
2	Penyediaan Sandang		68,210,449.00		29,633,500.00	43.44
3	Penyediaan Alat Bantu		149,058,676.00		135,352,000.00	90.80
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		22,170,447.00		0.00	0.00
5	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		47,007,875.00		0.00	0.00
6	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		61,083,482.00		0.00	0.00

7	Pemberian Layanan Kedaruratan		62,992,223.00		27,394,200.00		43.49
8	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		88,118,339.00		53,595,550.00		60.82
XI	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		296,843,709.00		0.00		0.00
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		29,489,533.00		0.00		0.00
2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		90,255,500.00		0.00		0.00
3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		116,288,100.00		0.00		0.00
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		60,810,576.00		0.00		0.00
5	Pemberian Layanan Rujukan		0.00		0.00		0.00
6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		0.00		0.00		0.00
XII	Program Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		28,542,043.00		20,020,050.00		70.14
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		15,680,605.00		10,024,100.00		63.93
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar		3,861,366.00		3,358,000.00		86.96

3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		9,000,072.00		6,637,950.00		73.75
XIII	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		920,224,562.00		802,924,000.00		87.25
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		146,404,457.00		140,425,500.00		95.92
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		3,057,363.00		0.00		0.00
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		727,914,169.00		662,498,500.00		91.01
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		42,848,573.00		0.00		0.00
XIV	Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		82,315,536.00		62,283,300.00		75.66
1	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		45,215,565.00		34,013,300.00		75.22
2	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		29,750,421.00		28,270,000.00		95.02
3	Pelayanan Dukungan Psikososial		7,349,550.00		0.00		0.00
XV	Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		90,767,855.00		85,758,500.00		94.48

1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		16,475,205.00		16,367,500.00		99.35
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		74,292,650.00		69,391,000.00		93.40
XVI	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		118,345,018.00		58,609,500.00		49.52
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		26,504,685.00		0.00		0.00
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		91,840,333.00		58,609,500.00		63.82
XVII	Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		68,965,900.00		5,782,141.00		8.38
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		9,445,012.00		0.00		0.00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		0.00		0.00		0.00
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		0.00		0.00		0.00

4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		59,520,888.00		5,782,141.00		9.71
XVIII	Program Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		128,010,519.00		23,534,193.00		18.38
1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		95,726,326.00		0.00		0.00
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		32,284,193.00		23,534,193.00		72.90
XIX	Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		84,895,864.00		17,386,300.00		20.48
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		29,116,563.00		17,386,300.00		59.71
2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan		55,779,301.00		0.00		0.00

	Kewenangan Kabupaten/Kota						
XX	Program Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		158,457,031.00		61,800,000.00		39.00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		54,070,715.00		0.00		0.00
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		104,386,316.00		61,800,000.00		59.20
XXI	Program Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		22,865,805.00		0.00		0.00
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		21,000,072.00		0.00		0.00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		1,865,733.00		0.00		0.00
XXII	Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga		49,999,804.00		0.00		0.00

	Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
1	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		49,999,804.00		0.00		0.00
XXIII	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		322,831,361.00		147,797,000.00		45.78
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		167,302,990.00		147,797,000.00		88.34
2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		75,312,539.00		0.00		0.00
3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		80,215,832.00		0.00		0.00
XXIV	Program Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya		193,252,216.00		14,520,000.00		7.51

	dalam Daerah Kabupaten/Kota						
1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		193,252,216.00		14,520,000.00		7.51
XXV	Program Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		82,793,365.00		8,223,911.00		9.93
1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		82,793,365.00		8,223,911.00		9.93
XXVI	Program Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		147,648,101.00		0.00		0.00
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		147,648,101.00		0.00		0.00
XXVII	Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		107,553,308.00		0.00		0.00

1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		107,553,308.00		0.00		0.00
XXVIII	Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		25,542,943.00		0.00		0.00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		25,542,943.00		0.00		0.00

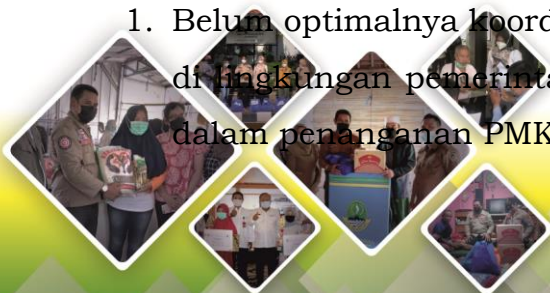
2.3. ISU – ISU PENTING PENYELANGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, bahwa Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, meliputi perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ke depan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:

1. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum terintegrasi secara optimal baik dengan pusat (Kementerian Sosial RI maupun dengan Dinas Sosial Provinsi dan DP3AKB Provinsi Jabar.
2. Kecenderungan peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial baik kualitas maupun kuantitas.
3. Belum optimalnya pemanfaatan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
4. Belum optimalnya penanganan bencana alam dan dampak sosial
5. Belum optimalnya penanganan penduduk miskin.
6. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai mitra kerja pemerintah yang strategis dalam penanganan PMKS luar panti.

Dalam pelaksanaannya tugas pokok dan fungsinya menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah pusat, pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta koordinasi dengan PSKS dalam penanganan PMKS.



2. Belum memadainya Sumber Daya Manusia bidang Kesejahteraan Sosial dalam menangani PMKS.
3. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam upaya mengembangkan pelayanan terhadap PMKS
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesejahteraan sosial disesuaikan dengan kondisi perkembangan terakhir.

Namun demikian upaya yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah meningkatkan koordinasi, pemenuhan SDM, pemenuhan sarana dan prasarana serta pemenuhan SOP sesuai dengan keadaan dalam upaya penanganan PMKS.

Isu strategis yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta mencakup aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat yang akhlakul karimah, Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat dan kualitas Lingkungan bhidup, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal,, ketersediaan infrastruktur dan pentaan wilayah, Mewujudkan penyelenggraraan Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

Memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Purwakarta, terkait dengan dinamika perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Purwakarta, baik kualitas maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu strategis yaitu:

1. Penanganan kemiskinan yang diprioritaskan kepada keluarga miskin belum optimal dan belum terpadu;
2. Penanganan PMKS jalanan belum optimal dan belum terpadu;
3. Partisipasi dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* di bidang kesejahteraan sosial belum optimal;
4. Data *base* PMKS dan PSKS belum terintegrasi maksimal dari pusat sampai daerah;
5. Penanganan jenis-jenis PMKS yang dapat dilayani di luar panti belum tertangani secara menyeluruh
6. SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial penyelenggara dan pelaksana penanganan PMKS belum memadai

Langkah-langkah yang ditetapkan Dinsos P3A dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah:

1. Meningkatkan sinkronitas dan sinergitas dalam penanganan fakir miskin.
2. Menciptakan keterpaduan program penangan PMKS jalanan secara terintegrasi.
3. Meningkatkan partisipasi dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* di bidang kesejahteraan sosial;
4. Mengintegrasikan Data base PMKS dan PSKS dari pusat sampai daerah melalui verifikasi dan validasi data yang berkala;
5. Penguatan peran serta Kabupaten dalam penanganan PMKS
6. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PMKS.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinsos P3A arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinsos P3A berdasarkan Rancangan Awal RKPD.





BAB III

RENCANA KERJA 2022

**DINAS SOSIAL P3A
KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga pada bagian kesatu klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari atas urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang menjadi urusan kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar termasuk didalamnya urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selanjutnya untuk mengintegrasikan dan menselaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, disusunlah klasifikasi dan nomenklatur berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terangkum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Tugas Pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yaitu unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan anak, dan dalam rangka melaksanakan Misi kesatu Kabupaten Purwakarta 2018-2023 yaitu **Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**, disusun serangkaian program dan kegiatan-kegiatan yang tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan Visi kabupaten Purwakarta 2018-2023 **“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”** yang dilaksanakan dengan Misi *Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik Bersih dan Profesional, Mewujudkan Pembangunan infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan, serta dengan Mengembangkan Perekonomian Rakyat yang Kokoh berbasis Desa*. Maka visi dan misi yang sudah ditetapkan tersebut harus dijabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terarah berupa pernyataan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Dengan diformulasikannya tujuan strategis organisasi perangkat daerah ini, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan sebagai dasar operasionalisasi dalam rangka mewujudkan visinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan pada Misi ke Satu Kabupaten Purwakarta 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dan sesuai dengan tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 maka

tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sebagai penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2018-2023 yaitu *Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Sasaran yang dirumuskan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta serta tujuan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan
2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan. Dalam rangka itu, perlu diidentifikasi pula

keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, sesuai dengan klasifikasi,



kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 4.1.



Tabel 3.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
DINAS SOSIAL P3A Tahun Anggaran 2022

Kode					SUB UNIT (SEKRETARIAT/ AT/ BIDANG/ BAGIAN)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output Belanja
						DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	6	1	2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	6	1	2	1	Sekretariat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1	6	1	2	3	Sekretariat	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1	6	1	2	5	Sekretariat	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1	6	1	2	6	Sekretariat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1	6	1	2	7	Sekretariat	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	6	1	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	6	1	2	1	Sekretariat	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1	6	1	2	5	Sekretariat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1	6	1	2			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	6	1	2	5	Sekretariat	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1	6	1	2,1			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	6	1	2,1	10	Bidang PPA/sekretariat	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1	6	1	2,1			Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	6	1	2,1	1	Sekretariat	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1	6	1	2,1	3	Sekretariat	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1	6	1	2,1	4	Sekretariat	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1	6	1	2,1	5	Sekretariat	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1	6	1	2,1	8	Sekretariat	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1	6	1	2,1	9	Sekretariat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1	6	1	2,1	10	Sekretariat	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1	6	1	2,1	11	Sekretariat	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1	6	1	2,1			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	6	1	2,1	2	Sekretariat	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1	6	1	2,1	5	Sekretariat	Pengadaan Mebel
1	6	1	2,1	11	Sekretariat	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1	6	1	2,1			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1	6	1	2,1	2	Sekretariat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1	6	1	2,1	4	Sekretariat	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1	6	1	2,1			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	6	1	2,1	2	Sekretariat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1	6	1	2,1	9	Sekretariat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1	6	1	2,1	10	Sekretariat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1	6	2				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1	6	2	2			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	6	2	2	1	Bidang Rehdayasos	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1	6	2	2			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1	6	2	2	1	Bidang Rehdayasos	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	2	2	2	Bidang Rehdayasos	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	2	2	3	Bidang Rehdayasos	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	2	2	4	Bidang Rehdayasos	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	2	2	5	Bidang Rehdayasos	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1	6	3				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
1	6	3	2			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
1	6	3	2	1	Bidang Rehdayasos	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
1	6	4				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1	6	4	2			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1	6	4	2	1	Bidang Rehdayasos	Penyediaan Permakanan
1	6	4	2	2	Bidang Rehdayasos	Penyediaan Sandang
1	6	4	2	3	Bidang Rehdayasos	Penyediaan Alat Bantu
1	6	4	2	5	Bidang Rehdayasos	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1	6	4	2	6	Bidang Rehdayasos	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
1	6	4	2	8	Bidang Rehdayasos	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	6	4	2	10	Bidang Rehdayasos	Pemberian Layanan Kedaruratan
1	6	4	2	11	Bidang Rehdayasos	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	6	4	2			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1	6	4	2	1	Bidang Rehdayasos	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1	6	4	2	7	Bidang Rehdayasos	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1	6	4	2	8	Bidang Rehdayasos	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
1	6	4	2	12	Bidang Rehdayasos	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

1	6	4	2	13	Bidang Rehdayasos	Pemberian Layanan Rujukan
1	6	4	2	14	Bidang Rehdayasos	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
					Bidang Rehdayasos	POKIR
						A.Penguatan kebutuhan /Penguatan LK3
						-Beras
						-Minyak Goreng
						-Telor
						-Gula
						-Susu Full Krim
						-ATK
					Bidang Rehdayasos	POKIR
						-Pelatihan Manajemen Organisasi/ Penguatan LKS Karangtaruna
						Uang Saku Peserta
						Makan Dan minum
						Honor Narasumber
						Tas
						Note Book
						Ballpoint
						Jaket
						Biaya Umum
					Bidang Rehdayasos	Pembentukan Desa Berkegiatan sosial melalui optimalisasi kegiatan Puskesmas di 10 Desa
						A.Sarana Pelayanan
						-Meja Kerja
						-Kursi Kerja
						-Kursi Tunggu
						-Lemari Arsip
						-Tempat Tidur Pasien
						-Blankar
						-Sound Aktif Bluetooth
						B.Alat Bantu Kegiatan
						-ATK

2	8	2	2	1	Bidang PP	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2	8	2	2	2	Bidang PP	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2	8	2	2			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	2	2	1	Bidang PP	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	2	2	3	Bidang PP	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	3				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2	8	3	2			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	8	3	2	1	Bidang PPA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	8	3	2	2	Bidang PPA	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	3	2			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	3	2	1	Bidang PPA	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	3	2	2	Bidang PPA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	3	2			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	8	3	2	4	Bidang PPA	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	4				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2	8	4	2			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	8	4	2	1	Bidang PP	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	4	2	2	Bidang PP	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	4	2	3	Bidang PP	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	4	2			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	8	4	2	1	Bidang PP	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	8	5				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2	8	5	2			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	8	5	2	1	Bidang PPA	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	6				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2	8	6	2			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	6	2	1	Bidang PPA	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	6	2			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	6	2	1	Bidang PPA	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	7				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2	8	7	2			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	8	7	2	3	Bidang PPA	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



BAB IV

RENCANA KERJA 2022

**DINAS SOSIAL P3A
KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana kerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2021 di susun sesuai dengan pemetaan program Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan. Semua proses pemuktahiran dilakukan melalui Sistem Aplikasi Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Setelah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta mendapat wewenang untuk pengelolaan Makam Pahlawan yang pada tahun-tahun sebelumnya hal itu dikelola oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta.

Adapun rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Anggaran Pendapatan Perbendaharaan Daerah (APBD) sebesar Rp. 13.738.878.108,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Rupiah) terdiri dari 30 (tiga puluh) kegiatan, 82 sub kegiatan dengan lokasi kegiatan Kabupaten Purwakarta.

Rencana program, kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2022 untuk membantu Kepala Daerah khususnya pada urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan anak. Rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2022 lebih rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode	SUB UNIT (SEKRETARIAT/ BIDANG/ BAGIAN)	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output Belanja	SUMBER DANA					TOTAL PAGU	KET				
			APBD	DAK FISIK	DAK NON FISIK	DANA BAGI HASIL.....	BAN PROV						
1		3	4	5	6	7	8	9	10				
		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.738.878.108	-	-	-	-	13.738.878.108					
1	6	1	8.826.653.133	0	0	0	0	8.826.653.133					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000					
1	6	1	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
1	6	1	2	1	Sekretariat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	
						Cetak Dokumen 2 buku							
					X	Belanja alat/Bahan Kegiatan kantor-Kertas dan cover	1.237.740	0	0	0	0	1.237.740	
						Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kator-bahan cetak	72.000	0	0	0	0	72.000	
						Benda Pos	100.000	0	0	0	0	100.000	
						Bahan komputer falsdisc	686.925	0	0	0	0	686.925	
						Mamin Rapat	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000	
						Honor BPP	1.040.000	0	0	0	0	1.040.000	
						SPPD luar daerah	1.610.000	0	0	0	0	1.610.000	
						SPPD dalam daerah	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	
						ATK	1.603.100	0	0	0	0	1.603.100	
						Pembulatan SIPD	235						
1	6	1	2	3	Sekretariat	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	
					X	Penjilidan Dokumen RKA 5 buku						8.999.855	
					X	ATK	1.352.565	0	0	0	0	1.352.565	
						Belanja alat/Bahan Kegiatan kantor-Kertas dan cover	1.379.000	0	0	0	0	1.379.000	
						Bahan Cetak	1.149.750	0	0	0	0	1.149.750	
						Benda pos	100.000	0	0	0	0	100.000	
						Bahan komputer falsdisc, tinta Brother dan tinta epson	3.258.540	0	0	0	0	3.258.540	
						Mamin Rapat	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	
						Honor BPP	260.000	0	0	0	0	260.000	
						Pembulatan SIPD	145						
1	6	1	2	5	Sekretariat	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	
					X	Penjilidan dan pengandaan 5 buku						0	
						ATK	743.169	0	0	0	0	743.169	
						Belanja alat/Bahan Kegiatan kantor-Kertas dan cover	1.761.800	0	0	0	0	1.761.800	
						Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kator-bahan cetak	203.750	0	0	0	0	203.750	
						Benda pos	100.000	0	0	0	0	100.000	
						Bahan komputer tinta Brother dan tinta epson	1.931.130	0	0	0	0	1.931.130	
						Honor BPP	260.000	0	0	0	0	260.000	
					X	Pembulatan SIPD	151						
1	6	1	2	6	Sekretariat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	
					X	Penjilidan dan pengandaan 5 buku, bahan komputer -tinta,						0	
						ATK	1.649.900	0	0	0	0	1.649.900	
						Belanja alat/Bahan Kegiatan kantor-Kertas dan cover	436.580	0	0	0	0	436.580	
						Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kator-bahan cetak	90.500	0	0	0	0	90.500	
						Benda pos	100.000	0	0	0	0	100.000	
						Bahan komputer tinta	1.602.180	0	0	0	0	1.602.180	
						Mamin Rapat	600.000	0	0	0	0	600.000	
						Honor BPP	520.000	0	0	0	0	520.000	
						Pembulatan SIPD	840						
1	6	1	2	7	Sekretariat	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	
					X	ATK	656.610	0	0	0	0	656.610	
						Belanja alat/Bahan Kegiatan kantor-Kertas dan cover	1.072.060	0	0	0	0	1.072.060	
						Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kator-bahan cetak	147.500	0	0	0	0	147.500	
						Benda Pos	100.000	0	0	0	0	100.000	
						Mamin Rapat	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	

					X		Bahan cetak 193 buku	8.659.250	0	0	0	0	8.659.250
							Pembulatan SIPD	150					
1	6	1	2,1	8		Sekretariat	Fasilitas Kunjungan Tamu	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
					X		Mamin Rapat	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
							Mamin Tamu	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
1	6	1	2,1	9		Sekretariat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000
					X		Perjalanan dinas luar daerah gol 3 = 7 otd, gol IV 5 Org, gol II 2 org, dan biaya penginapan gol IV /III 2 org, gol IV 5 org	72.550.000	0	0	0	0	72.550.000
							perjalanan dinas dalam kota	2.445.000	0	0	0	0	2.445.000
					X		Pembulatan SIPD	5.000					
1	6	1	2,1	10		Sekretariat	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000
					X		ATK	40.478.910	0	0	0	0	40.478.910
							Kertas dan cover	6.501.600	0	0	0	0	6.501.600
							Bahan cetak 10 buku , kartu disposisi, kartu surat masuk , fotocopy	5.361.700	0	0	0	0	5.361.700
							Bahan komputer	6.617.700	0	0	0	0	6.617.700
							Honor BPP	1.040.090	0	0	0	0	1.040.090
1	6	1	2,1	11		Sekretariat	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000
							Bahan Cetak	223.250	0	0	0	0	223.250
							Jasa konsultasi non kontruksi	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
							Router Wifi 3 unit	1.677.000	0	0	0	0	1.677.000
							Komputer unit lainnya	8.085.075	0	0	0	0	8.085.075
							Komputer server , Desktop computer apple I mac	40.014.510	0	0	0	0	40.014.510
					X		Pembulatan SIPD	165					
1	6	1	2,1				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	833.777.008	0	0	0	0	833.777.008
1	6	1	2,1	2		Sekretariat	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	583.777.008	0	0	0	0	583.777.008
							Honorarium Pengadaan Barang	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
					X		Honor BPP	370.000	0	0	0	0	370.000
							Jasa tenaga Supir	6.400.000	0	0	0	0	6.400.000
							Tunjangan Keahlian supir	500.000	0	0	0	0	500.000
							Kendaraan operasional mini bus R4	328.246.000	0	0	0	0	328.246.000
							kendaraan lapangan roda 2 = 3 unit	109.776.008	0	0	0	0	109.776.008
					X		kendaraan operasional kantor Roda 2	137.085.000	0	0	0	0	137.085.000
1	6	1	2,1	5		Sekretariat	Pengadaan Mebel	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000
					X		Bahan cetak	178.500	0	0	0	0	178.500
					X		honor BPP	780.000	0	0	0	0	780.000
							Belanja mebel	24.633.840	0	0	0	0	24.633.840
							Meja kerja staf	4.953.600	0	0	0	0	4.953.600
							Kursi kerja staf	4.647.870	0	0	0	0	4.647.870
							filing vcabinet, lemari 2 pintu, mobile file system manual	64.773.996	0	0	0	0	64.773.996
							Pembulatan SIPD	32.194					
1	6	1	2,1	11		Sekretariat	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000
							Honorarium Pengadaan barang	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
							ATK	544.395	0	0	0	0	544.395
							Kertas - cover	1.102.950	0	0	0	0	1.102.950
							Bahan cetak	540.750	0	0	0	0	540.750
							Bahan komputer	1.323.540	0	0	0	0	1.323.540
							Honor BPP	1.240.000	0	0	0	0	1.240.000
							Alat kantor lainnya , UPS 1 unit	3.210.165	0	0	0	0	3.210.165
							Toa (speaker)	7.875.450	0	0	0	0	7.875.450
					X		peralatan alat studio audio microphone 1 unit	1.406.100	0	0	0	0	1.406.100
							peralatan alat studio video dan film CCTV 10 unit , video camera 1 unit	48.658.800	0	0	0	0	48.658.800
							alat komunikasi telephone facsimile	1.709.250	0	0	0	0	1.709.250
							Personal komputer desk top	41.022.000	0	0	0	0	41.022.000
							Personal komputer scanner	19.516.000	0	0	0	0	19.516.000
					X		Peralatan komputer lainnya Hardisk, prointer, webcam	20.550.600	0	0	0	0	20.550.600
1	6	1	2,1				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629.648.000	0	0	0	0	629.648.000
1	6	1	2,1	2		Sekretariat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000
					X		Alat Listrik , lampu baret dan lampu sosrot	125.000.000	0	0	0	0	124.991.650
1	6	1	2,1	4		Sekretariat	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	504.648.000	0	0	0	0	504.648.000
							Honor BPP	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
							Belanja jasa tenaga Administrasi 9 orang	216.000.000	0	0	0	0	216.000.000
					X		Tenaga kebersihan 3 org	57.600.000	0	0	0	0	57.600.000

							Tenaga keamanan 3 org		57.600.000	0	0	0	0	57.600.000	
							Tenaga IT 1 org		3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	
						X	BPJS non ASN 19 org		37.848.000	0	0	0	0	37.848.000	
							PTT 4 org		96.000.000	0	0	0	0	96.000.000	
							Tunjangan PTT 4 org		33.600.000	0	0	0	0	33.600.000	
1	6	1	2,1				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		430.000.000	0	0	0	0	430.000.000	
1	6	1	2,1	2		Sekretariat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	
							Belanja Pembayaran pajak kendaraan bermotot Roda 2		16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	
							Pajak kendaraan bermotor roda 4		84.000.000	0	0	0	0	84.000.000	
1	6	1	2,1	9		Sekretariat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	
							Honorarium pengadaan Barjas honor PPTK		350.000	0	0	0	0	350.000	
							Belanja kertas dan cover		627.585	0	0	0	0	627.585	
							Bahan komputer		1.032.000	0	0	0	0	1.032.000	
							honor BPP		930.000	0	0	0	0	930.000	
							Jasa desain Arsitektur Penyusunan DED gedung kantor		127.875.000	0	0	0	0	127.875.000	
						X	sewa gedung		150.000.000					150.000.000	
							Pembulatan SIPD		33.415						
						X	Nama plank Dinas		19.152.000	0	0	0	0	19.152.000	
1	6	1	2,1	10		Sekretariat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	
						X	Belanja Jasa pemeliharaan		30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	
						X								0	
1	6	2					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		296.420.603	0	0	0	0	296.420.603	
1	6	2	2				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	
1	6	2	2	1		Bidang Rehdayasos	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	
						X	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1.667.000	0	0	0	0	1.667.000	
						X	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.784.600	0	0	0	0	2.784.600	
							kurang entry ATK		8.606.950						
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1.941.450	0	0	0	0	1.941.450	
1	6	2	2				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		281.420.603	0	0	0	0	281.420.603	
1	6	2	2	1		Bidang Rehdayasos	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		66.647.135	0	0	0	0	66.647.135	
						X	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa		50.412.098	0	0	0	0	50.310.000	
						X	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga		16.235.037	0	0	0	0	16.235.037	
1	6	2	2	2		Bidang Rehdayasos	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		32.007.327	0	0	0	0	32.007.327	
						X	Belanja Bahan-Bahan Baku		32.007.327	0	0	0	0	32.005.410	
						X								0	
1	6	2	2	3		Bidang Rehdayasos	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		49.442.428	0	0	0	0	49.442.428	
						X	Belanja Bahan-Bahan Baku		49.442.428	0	0	0	0	49.439.100	
						X								0	
1	6	2	2	4		Bidang Rehdayasos	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		91.398.169	0	0	0	0	91.398.169	
						X	Belanja bahan-bahan baku		91.398.169	0	0	0	0	91.388.780	
						X								0	
1	6	2	2	5		Bidang Rehdayasos	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		41.925.544	0	0	0	0	41.925.544	
						X	Belanja bahan-bahan baku		41.925.544	0	0	0	0	55.956.180	
						X								0	
1	6	3					PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		12.941.617	0	0	0	0	12.941.617	
1	6	3	2				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		12.941.617	0	0	0	0	12.941.617	
1	6	3	2	1		Bidang Rehdayasos	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		12.941.617	0	0	0	0	12.941.617	
						X	Migran terfasilitasi = 10 org		12.941.617					0	
						X									
1	6	4					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1.478.797.497	0	0	0	0	1.478.797.497	
1	6	4	2				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		651.489.293	0	0	0	0	651.489.293	

1	6	4	2	1		Bidang Rehdayasos	Penyediaan Permakanan	134.282.739	0	0	0	0	134.282.739	
							Belanja bahan-bahan baku	107.211.279	0	0	0	0	107.211.279	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.212.140	0	0	0	0	8.212.140	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.438.100	0	0	0	0	2.438.100	
						X	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750.000	0	0	0	0	750.000	
						X	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.499.770	0	0	0	0	3.499.770	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	433.160	0	0	0	0	433.160	
							Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	9.418.290	0	0	0	0	9.418.290	
							Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	
							Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	520.000	0	0	0	0	520.000	
1	6	4	2	2		Bidang Rehdayasos	Penyediaan Sandang	70.833.034	0	0	0	0	70.833.034	
						X	Belanja Bahan-Bahan Baku	8.205.230	0	0	0	0	8.205.230	
						X	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.934.750	0	0	0	0	2.934.750	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.644.000	0	0	0	0	4.644.000	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.027.094	0	0	0	0	13.027.094	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	22.863.960	0	0	0	0	22.863.960	
							Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	
							Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.158.000	0	0	0	0	13.158.000	
1	6	4	2	3		Bidang Rehdayasos	Penyediaan Alat Bantu	151.681.261	0	0	0	0	151.681.261	
						X	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	425.721	0	0	0	0	425.721	
						X	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.806.000	0	0	0	0	1.806.000	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	259.500	0	0	0	0	259.500	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.323.540	0	0	0	0	1.323.540	
							Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	146.866.500	0	0	0	0	146.866.500	
1	6	4	2	5		Bidang Rehdayasos	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	
						X	Belanja Bahan-Bahan Baku	24.722.650	0	0	0	0	24.722.650	
						X	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	277.350	0	0	0	0	277.350	
1	6	4	2	6		Bidang Rehdayasos	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	49.630.460	0	0	0	0	49.630.460	
						X	Belanja Bahan-Bahan Baku	46.102.190	0	0	0	0	46.102.190	
						X	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	374.100	0	0	0	0	374.100	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	722.400	0	0	0	0	722.400	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000	0	0	0	0	250.000	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	661.770	0	0	0	0	661.770	
							Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	400.000	0	0	0	0	400.000	
							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.120.000	0	0	0	0	1.120.000	
1	6	4	2	8		Bidang Rehdayasos	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	63.706.067	0	0	0	0	63.706.067	
						X	Belanja Bahan-Bahan Baku	43.053.733	0	0	0	0	43.053.733	
						X	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.713.660	0	0	0	0	4.713.660	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.720.360	0	0	0	0	3.720.360	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	998.000	0	0	0	0	998.000	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.308.850	0	0	0	0	3.308.850	
							Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	520.000	0	0	0	0	520.000	
							Belanja Modal Peralatan Permainan	7.391.464	0	0	0	0	7.391.464	
1	6	4	2	10		Bidang Rehdayasos	Pemberian Layanan Kedaruratan	65.614.808	0	0	0	0	65.614.808	
						X	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	558.748	0	0	0	0	558.748	
						X	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	451.500	0	0	0	0	451.500	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	379.250	0	0	0	0	379.250	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.985.310	0	0	0	0	1.985.310	
							Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.240.000	0	0	0	0	62.240.000	
1	6	4	2	11		Bidang Rehdayasos	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	90.740.924	0	0	0	0	90.740.924	
						X	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.928.644	0	0	0	0	1.928.644	
						X	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.541.300	0	0	0	0	2.541.300	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	898.500	0	0	0	0	898.500	



BAB V

RENCANA KERJA 2022

**DINAS SOSIAL P3A
KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2022 merupakan rencana kerja program dan kegiatan selama satu tahun anggaran kedepan dan juga merupakan terjemahan teknis dari perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2019-2023 dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019-2023. Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta, selanjutnya rencana kerja ini akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD tahun anggaran 2022.

Program dan kegiatan dibuat berdasarkan informasi perencanaan program dan kegiatan dari bidang-bidang di lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan dapat menangani, melayani dan meminimalisir permasalahan permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan anak. Untuk mendorong keberhasilan pembangunan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak, rencana kerja ini menggunakan indikator-indikator yang terukur, sekaligus sebagai acuan dan kontrol terhadap semua kegiatan dalam merealisasikan visi dan misi Pemerintah Daerah kabupaten Purwakarta yaitu "*Mewujudkan Purwakarta Istimewa*" dan tidak terlepas dari klasifikasi dan kodetifikasi yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Keberhasilan rencana kerja ini memerlukan dukungan dan kerja keras semua pihak, baik lintas Perangkat Daerah, Legislatif dan masyarakat. Semoga rencana kerja ini dapat menjadi bahan penyusunan program-program pembangunan daerah dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Purwakarta, 04 Oktober 2021



Kepala Dinas Sosial P3A
Kabupaten Purwakarta,

Asep Surya Komara, SH, M.Si
NIP. 19650612 198703 1 007



